Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek

Fahmi Anugraha*

Magister Ilmu hukum, Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email :

Abstract : *Counterfeiting of the brand of a product or service often occurs in Indonesia. Almost the same brand for the same product often creates legal problems. The proliferation of well-known foreign products in Indonesia, provides a new homework for Indonesia, especially related to legal protection for these brands from counterfeiting that could occur. Business competition that is increasing both at home and abroad in the current era of global trade, makes the role of Intellectual Property Rights (IPR) law very important, especially in maintaining healthy business competition and to prevent the possibility of fraudulent competition in the form of imitation, piracy, as well as the use of Intellectual Property Rights without the rights of the real owner. This research uses the normative juridical method, which examines the formulation of legal protection issues in the trademark registration process in relation to the principles of good faith, and the responsibility of the Government is linked to the principle of good faith in the process of mark registration.*

Keyword : Brand, Foreign Affairs, Intellectual Property.

Submit:

Review:

Publish:

Abstrak : Pemalsuan terhadap merek sebuah produk barang atau jasa sering kali terjadi di Indonesia. Merek yang hampir sama banyak terhadap satu produk yang sama sering menimbulkan permasalahan hukum. Menjamurnya produk-produk terkenal luar negeri di Indonesia, memberikan sebuah pekerjaan rumah baru bagi Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi mereka-merek tersebut dari pemalsuan yang dapat saja terjadi. persaingan bisnis yang semakin meningkat baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, menjadikan peran hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat serta untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengkaji rumusan masalah perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik, dan tanggungjawab Pemerintah dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran merek

Kata Kunci : Merek, Luar Negeri, Kekayaan Intelektual.

Citation :

PENDAHULUAN

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Menurut Asyhadie (2014) pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Terkait Hak Kekayaan Intelektual tersebut salah satu hak yang sangat di lindungi di Indonesia ialah HAKI tentang Hak Merek. Hal itu dikarenakan merek merupakan suatu hak yang sangat penting dalam kegiatan usaha ataupun perdagangan. Sehingga dengan demikian Pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengikat-nya secara hukum. Ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek (Asyhadie : 2014).

Menjamurnya produk-produk terkenal luar negeri di Indonesia, memberikan sebuah pekerjaan rumah baru bagi Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi mereka-merek tersebut dari pemalsuan yang dapat saja terjadi. Persaingan bisnis yang semakin meningkat baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, menjadikan peran hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat serta untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya (Sulastri, dkk : 2018).

Pemalsuan terhadap merek sebuah produk barang atau jasa seringkali terjadi di Indonesia. Merek yang hampir sama banyak terhadap satu produk yang sama sering menimbulkan permasalahan hukum. Misalnya antara Oreo dengan Oredo, Tupperware dengan Tulipware, Honda Karisma dengan Tossa Krisma, dan banyak kasus lainnya. Sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat eksklusif dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh menggunakannya tanpa seizin pemiliknya (Suajtmiko : 2016).

Perbuatan curang yang dilakukan dalam persaingan usaha yang tidak sehat sering muncul, apabila ada suatu merek produk, baik barang ataupun jasa tertentu, yang lebih dahulu terkenal dan laku di pasaran, sehingga hal ini cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek tersebut. Masalahnya, pengusaha tersebut lebih sering menggunakan cara-cara yang tidak patut atau bertentangan dengan hukum untuk meraih keuntungan dengan sangat cepat dan besar. Misalnya dengan cara peniruan atau pemalsuan merek terkenal. Fungsi merek dalam hal ini, adalah sebagai sarana pencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal-muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original (Saidin : 2015).

Meskipun prinsip *first to file principle*, bukan *first come*, telah diterapkan dalam Undang-Undang Merek, namun bukan berarti kasus praktik pelanggaran merek tidak terjadi lagi, namun sebaliknya setiap tahun selalu ada kasus hukum terkait pelanggaran merek, atas dasar kemiripan merek yang digunakan. Salah satu kasus terkait merek tersebut ialah kasus yang terjadi antara PT Intigramindo Persada yang diwakili oleh Direktur Utama Indra Halim, sebagai penerima lisensi dari pihak Lois Trade Mark-Consultores E Servicios S.A., berdasarkan *Trademark License Agreement* tertanggal 1 Juni 2013 dan sekaligus pemilik merek LOIS yang bergerak pada barang-barang pakaian luar dan pakaian dalam, alas kaki serta tutup kepala melawan Agus Salim yang tertuang dalam Putusan Nomor 789 K/Pdt. Sus-Hki/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt. Sus-Hki/2016 menjelaskan terkait perselisihan Indra Halim menggugat saudara Agus Salim sebagai pemilik merek NEWLOIS dan REDLOIS, memiliki nomor sertifikat dengan nomor IDM000043020, yang bergerak dalam pengadaan barang segala macam pakaian jadi, pakaian luar dan dalam untuk pria, wanita, anak-anak dan bayi, baju jeans, celana jeans, rok/blouse, kaos oblong, kaos singlet, pakaian olahraga, pakaian tidur, pakaian renang, jubah, celana dalam,

kutang, piyama, kulot, korset, safari, stelan jas, dasi, sarung tangan, ban pinggang, topi, sandal, sepatu, sol sepatu, selop.

Indra Halim sebagai penerima lisensi resmi dari pihak LOIS menilai bahwa merek NEWLOIS dan REDLOIS milik tergugat Agus Salim terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Ediwarman (2014) penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan. Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian ini seperti juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*) (Nasution : 2003).

Prosesur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hal itu pada pokoknya teknik pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum perpustakaan (Edirwarman : 2016).

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Dalam Proses Pendaftaran Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik

Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi, itu sesuai dengan pengertian hak sebagaimana yang dikembangkan oleh Sudikno Mertokusumo (1989), bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Achmad Umar Zen Purba (2005) bahwa sebagai bagian dari HaKI, hak merek itu bagian dari hak obyek kekayaan (*property*), dan sebagai hak, hak merek merupakan harta atau aset berupa benda yang tidak berwujud (*intangible asset*). Oleh sebab itu pada hakikatnya merk khususnya di Indonesia harus dilindungi karena terkait dengan hak yang dimiliki seseorang atas kreativitasnya, sehingga kemudian hak-hak dari orang tersebut dapat terlindungi sebagaimana mestinya.

Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, oleh karenanya masalah merek perlu diatur dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek yaitu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Simatupang : 2003).

Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 Undang-Undang Merek telah mengaskan pengertian dari merek, di dalam undang-undang merek yang baru juga tidak terlalu berbeda dengan pengertian merek pada undang-undang yang lalu. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan merek, yaitu: Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan teori pengakuan atas kekayaan intelektual tentu peraturan perundang-undang itu dibentuk untuk memenuhi rasa keadilan dan keamanan di dalam masyarakat (Warga negara Indonesia), akan tetapi aturan yang dibentuk tetap harus berada dalam koridor nilai-nilai kepatutan Pancasila yang memperhatikan tiap-tiap silanya. Sehingga tanggungjawab negara hukum untuk melindungi tiap warga negaranya termasuk pengusaha-pengusaha ataupun para pemegang hak kekayaan intelektual seperti hak merek sesuai dengan asas keadilan bagi semuanya. Oleh karena itu uraian di dalam Undang-Undang Merek juga tidak boleh keluar dari kaidah yang dimaksud di dalam teori pengakuan atas kekayaan intelektual itu. Sehingga produk hukum merek yang dibuat tetap berpegangan tidak hanya untuk kepentingan masyarakat melainkan juga kepentingan perkembangan negara.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal. Selanjutnya mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat (Simatupang : 2003).

Artinya kedudukan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat dibuktikan dari berbagai uraian pasal dalam undang-undang tersebut yang bermaksud untuk melindungi pemegang hak merek terdaftar yang sebenarnya. Seperti yang di uraikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik", maka tegaslah bahwa ketika seseorang ingin mendaftarkan hak merek secara sah diawali dengan suatu prinsip itikad baik (perlawanan dari itikad tidak baik). Wujud dari prinsip itikad baik itu juga dapat terlihat dari penentuan tidak semua merek dapat didaftarkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan, yaitu apabila:

1. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum. Misalnya, tanda tengkora di atas dua tulang yang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda ini telah menjadi milik umum;
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan baran gatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Misalnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi (Simatupang : 2003).

Kedudukan prinsip itikad baik itu juga dibuktikan dari perlindungan merek terkenal yang telah dipakai oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan perdagangan. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di depan, merupakan perlindungan hukum yang jitu bagi perlindungan merek-merek terkenal milik orang lain.

Penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali, ini merupakan penjelasan atas UU Nomor 20 Tahun 2016.

Pengaturan tentang merek di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dengan pergantian undang-undang. Peraturan tentang merek pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah UU Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sebelumnya, Indonesia menggunakan UU merek Kolonial tahun 1912. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia memperbaharui pengaturan merek dalam UU Nomor 21 tahun 1961 dengan UU Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1997, dalam rangka menyesuaikan dengan perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPS*)-GATT.

Pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan UU Nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Selanjutnya dilakukan perubahan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memuat ketentuan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional Tentang Aspek-Aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPS*)-GATT. Beberapa perubahan penting lain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat (Tim Lindsey, dkk. : 2003).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan pengaturan terbaru tentang merek yang berlaku saat ini. Dimana keluarnya pengaturan baru ini dikarenakan pertimbangan yuridis yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 bagian konsideran huruf c yang menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.

Beberapa penyempurnaan terhadap Undang-Undang Merek sebagaimana termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon merek adalah dalam bentuk penyederhanaan proses dan prosesur pendaftaran Merek dengan adanya pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan.

Pelanggaran hak atas merek akan merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut (Saidin : 2004). Oleh sebab itu prinsip itikad baik mempunyai kedudukan yang krusial di dalam proses pendaftaran hak merek baik itu dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis lebih cenderung merujuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan agar negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. Pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal dimasyarakat (Wibowo : 2015).

Atas dasar itu dinilai penerapan dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek (Wibowo : 2015).

Prinsip baik merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika pendaftaran merek, pasalnya pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dinyatakan permohonan pendaftaran merek tidak akan diterima jika tidak memiliki itikad baik. Dalam konteks ini dapat dikorelasikan bahwa prinsip itikad baik merupakan hal absolut untuk selanjutnya menggunakan hak atas merek tertentu. Ketika diketahui ada salah satu pihak yang mengajukan gugatan yang mana dianggap salah satu pihak lainnya menggunakan dalih adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak maka harus ditentukan oleh Pengadilan Niaga untuk putusan tingkat pertama dan dapat diajukan kasasi hingga peninjauan kembali.

Tanggungjawab Pemerintah Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terkait permohonan pendaftaran hak merek, selanjutnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Ditjen HAKI akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet (Simatupang). Uraian itu saat sekarang ini telah diubah dalam undang-undang merek yang baru pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan:

1. Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
2. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
3. Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Terkait pengumuman pendaftaran merek itu telah diubah dengan undang-undang yang baru baik dari sisi jangka waktu pengumuman maupun dari sisi sarana pengumuman baik itu sarana elektronik dan/atau non-elektronik. Oleh karenanya pada saat sekarang ini jika ingin melakukan permohonan pendaftaran hak merek landasan hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selama jangka waktu pengumuman Merek dalam Berita Resmi Merek, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan Pendaftaran Merek tersebut dengan dikenai biaya. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan, Direktorat Jenderal harus mengirimkan salinan surat keberatan kepada pemohon dan kuasanya. Dan pemohon atau kuasanya harus membalas surat keberatan dengan sautu sanggahan kepada Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. (Namun dalam Undang-Undang Merek yang baru keberatan dan sanggahan langsung disampaikan kepada pihak kementerian terkait).

Berdasarkan keberatan dan sanggahan tersebut Direktorat Jenderal memerintahkan kepada pemeriksa untuk mengadakan pemeriksaan kembali atas permohonan pendaftaran merek. Jika hasil pemeriksaan kembali menyatakan bahwa keberatan diterima maka permohonan pendaftaran merek ditolak. Sebaliknya jika keberatannya yang ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal/Menteri mere tersebut harus didaftar dalam Daftar Umum Merek, dan untuk selanjutnya kepada pemohon atau kuasanya akan diberikan sertifikat hak atas merek (Asyhadie).

Berkenaan dengan Perrnohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftarannya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek sesuai dengan penjelasan atas UU Nomor 20 Tahun 2016. Atas dasar itu proses dari pendaftaran merek harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dari merek yang akan didaftarkan tersebut.

Setelah semua proses berawal dari permohonan yang berdasarkan itikad baik, pemeriksaan, dan pengumuman dilewati oleh pihak pemohon pendaftaran merek dan pada akhirnya memenuhi syarat-syarat administratif dan pemeriksaan substantif, sehingga pemohon merek tersebut dinyatakan layak sebagai pemegang merek yang sah. Atas hal itu hak merek yang didaftarkan tersebut terdaftar dan dicantumkan dalam Daftar Umum Merek. Sehingga pantaslah pihak pemohon tersebut dinyatakan sebagai pemegang hak atas merek terdaftar. Disini pemegang hak atas merek terdaftar yang terbukti beritikad baik sudah mendapatkan kekuatan hukum atas mereknya dan diberikan perlindungan hukum dari negara, sebagaimana tanggungjawab negara sebagai negara hukum. Hal itu sebagai pengaplikasian dari teori perlindungan hukum itu sendiri.

Di dalam pembahasan ini merek terkenal yang dimaksud ialah merek LOIS yang bergerak pada barang-barang pakaian luar dan pakaian dalam, alas kaki serta tutup kepala. Dengan kata lain teranglah sudah bahwasannya kedudukan prinsip itikad baik di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas disebutkan pada Pasal 4, namun pada umumnya diuraikan secara gamblang di dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut guna melindungi pemegang hak merek.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi prinsip itikad baik dalam pendaftaran hak merek diaplikasikan secara nyata pada Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik." Oleh sebab itu pantaslah dikatakan kedudukan prinsip itikad baik di dalam Undang-Undang Merek yang baru ini nyata diterapkan. Sesuai dengan pemaparan sebelumnya yaitu teori perlindungan hukum dan teori pengakuan atas kekayaan intelektual bahwa untuk mengetahui secara jelas produk hukum yang dibuat tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat dan negara maka dapat dilihat dari uraian penjelasan dari undang-undang yang dimaksud, dalam hal ini penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penjelasan itu pada pokoknya menerangkan beberapa perbedaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Salah satu pembedanya ialah Undang-Undang Merek yang baru ada memfokuskan pembahasan terkait indikasi geografis. Hal itu mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-Undang 20 Tahun 2016 ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selain daripada itu ada pengembangan atas undang-undang yang baru, walaupun begitu prinsip itikad baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kegiatan pendaftaran hak merek.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang 20 Tahun 2016 lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *filing date*.

Perhatian masyarakat Internasional terhadap perlindungan HKI semakin meningkat dan bahkan menguat. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya konvensi-konvensi baru yang memperluas cakupan perlindungan HKI dan munculnya perjanjian internasional untuk memberi perlindungan HKI. Hal ini dimulai menjelang awal abad ke-19 (sembilan belas) kebutuhan pengaturan internasional di bidang HKI dirasakan perlu dilakukan karena adanya perkembangan teknologi yang berorientasi internasional dan peningkatan volume perdagangan internasional. Disamping itu kebutuhan untuk memperoleh perlindungan terhadap temuan-temuan di beberapa Negara mengalami kesulitan karena adanya peraturan yang berbeda-beda.

Tonggak sejarah pengaturan di bidang hak kekayaan intelektual diawali dengan diadakannya Konferensi Diplomatik tahun 1883 di Paris yang menghasilkan perjanjian internasional mengenai Perlindungan Hukum Milik Perindustrian atau disebut *Paris Convention for The Protection on Industrial Property-Paris Convention*. Tiga tahun kemudian di Bern dihasilkan juga perjanjian internasional di bidang Perlindungan Hak Cipta yaitu *International Convention for The Protection of Literary and Artistic Work (Bern Convention)*. Revisi terakhir terhadap kedua konvensi tersebut dilakukan tahun 1967 untuk Konvensi Paris dan tahun 1971 untuk Konvensi Bern. Perlindungan terhadap karya cipta diperluas terhadap karya-karya tampilan pada suatu phonogram, produser phonogram dan hasil siaran, seperti yang diatur dalam *International Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organizations (Rome Convention 1961)*, *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty 1989)* memberikan perlindungan atas tampilan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Melalui konferensi internasional tahun 1967 di Stockholm dibentuk *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Pada tahun 1970 WIPO menjadi Badan Khusus (*Specialized Agencies*) PBB.

Perlindungan hukum terhadap HKI mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tatanan internasional dan bahkan menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberalisasi sekarang ini. Khususnya sejak menjadi salah satu agenda di dalam perundingan Putaran Uruguay atau *Uruguay Round* yang berlangsung dari tahun 1986 sampai 1994. Perundingan yang melahirkan *World Trade Organization (WTO)* atau Organisasi Perdagangan Dunia dan juga disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (*Trade Related Aspects of*

Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement), yang telah diratifikasi oleh 150 lebih negara di dunia. Perjanjian ini mengukuhkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih ketat dan memperluas ruang lingkup perlindungan HKI dari perjanjian internasional sebelumnya yang diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, seperti *Bern Convention, Paris Convention, Rome Convention dan Washington Treaty*. Pemberian sanksi bagi pelaku pendaftaran merek yang tidak beritikad baik akibat ada persamaan merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek yang sah. Melalui pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan ini kepada pelaku pelanggaran, diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada si pelaku agar tidak melakukan perbuatan pelanggaran hak merek itu lagi. Hak merek salah satu hak milik intelektual yang harus dilindungi, karena berkaitan dengan kegiatan aspek bisnis perindustrian yang menghasilkn perkembangan ekonomi baik kepada pelaku usaha yang memiliki dan menjual brand mereknya maupun kepada negara yang mendapatkan hasil perputaran ekonomi dari penjualan barang bermerek tersebut. Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah hal yang dinamakan dengan hak milik intelektual (*intellectual property right*). Karena hak milik intelektual (HMI) ini berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi atau aspek ekonomi maupun seni. Bahkan beberapa waktu yang lalu seorang perancang model Italia (terkait Hak Merek) bernama Piere Cardin, datang ke Indonesia untuk meminta kepada Pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan hasil karya seseorang untuk tidak melakukan pembajakan karyanya secara “semau gue” (secara ilegal/melanggar hukum).

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasawarsa terakhir ini, hak milik intelektual terus dibicarakan tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga bangsa-bangsa dan negara-negara lain yang mempunyai masalah yang sama. Dalam konteks hubungan antara negara, hak milik intelektual telah menjadi salah satu isu yang terus menarik perhatian kalangan bisnis. Diketahui bahwa hak milik intelektual timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh karenanya menurut Simatupang pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hat atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia (khususnya terhadap hak merek yang dibuat oleh suatu perusahaan). Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit.

Pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hak merek merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam teori perlindungan hukum yang menjadi bagian dari pisau analisis dalam penelitian ini. Teori perlindungan hukum menjamin hak dan kewajiban setiap orang/subjek hukum terpenuhi, dan perlindungan hukum itu dijamin oleh negara. Sehingga jika terjadi pelanggaran hak kepada pihak pemegang hak merek terdaftar, maka si pelaku layak diberikan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara. Berdasarkan teori perlindungan hukum sanksi tersebut merupakan hal yang dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi.

Sanksi bagi Pelaku Pendaftaran Merek yang Tidak Beritikad Baik Akibat Ada Persamaan Merek merupakan bukti dari adanya prinsip itikad baik di dalam perlindungan hukum atas pemegang hak merek terdaftar. Sanksi ini erat kaitannya dengan kepastian hukum yang hendak di dapati oleh seorang subjek hukum yang memiliki hak secara legal/hukum. Di dalam hukum kontrak terdapat suatu prinsip bahwa perjanjian yang dibuat dengan itikad baik mengikat para pembuatnya sebagaimana undang-undang. Apabila hal ini disimpangi oleh pengadilan berarti pihak pengadilan telah menyimpangi sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak sehingga mengancam kepastian hukum. Demikian pula halnya, dengan penyimpangan terhadap aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang membuat aturan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum (Marzuki : 2013).

Berbicara tentang pembahasan pokok yaitu perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar, tentu tidak terlepas dari pembahasan tentang kedudukan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada para pemegang hak merek yang beritikad dalam proses pendaftaran merek. Kedudukan hukum itu dapat terlihat dari hak-hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak merek yang telah terpenuhi syarat-syarat sehingga terdaftar dan diberikan oleh Pemerintah sertifikat pemegang hak merek yang sah.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Pemberian hak dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkedudukan hukum sebagai pemilik ataupun pemegang hak merek terdaftar yang memenuhi syarat pemohon yang beritikad baik, teori pengakuan atas hak kekayaan intelektual (*reward theory*) juga mengakomodir hal yang demikian. Karena setiap orang/badan usaha yang telah terbukti secara hukum memiliki hak atas merek, maka baginya harus diberikan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual, sebagai penghargaan bagi dirinya yang telah susah payah dalam memberikan karya berupa merek. Sehingga berdasarkan teori pengakuan HAKI tersebut pengakuan itu diakomodir dalam suatu bentuk pemberian hak secara hukum dan juga diberikan perlindungan hukum baginya.

Terkait Kedudukan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak merek terdaftar dapat dilihat dari contoh kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Seperti uraian yang telah dipaparkan di latar belakang sebelumnya bahwasannya persoalan di dalam perkara tersebut terkait adanya pendaftaran hak merek baru terhadap merek yang secara keseluruhan atau pada pokoknya sama, yang juga telah didaftarkan sebelumnya. Sehingga dengan begitu pemegang hak merek terdaftar yaitu merek LOIS, merasa keberatan atas pendaftaran hak merek yang dilakukan pihak lain dengan merek yang mirip ataupun serupa yaitu merek NEWLOIS dan REDLOIS.

Pada dasarnya dalam menilai ketentuan hukum yang digunakan pada saat sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam contoh kasus itu sebagai penerima lisensi dan pemegang kuasa dari pihak LOIS, Penggugat diberi hak untuk membuat dan mendistribusikan secara sah di Indonesia suatu pakaian dengan Merek dagang LOIS dan melakukan setiap langkah hukum yang diperlukan serta setiap dan semua tindakan hukum untuk menuntut setiap dan semua orang atau badan atas pelanggaran dan/atau penggunaan Merek dagang LOIS serta untuk menuntut setiap produsen LOIS atas produk palsu dan/atau tiruan di Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016).

Kedudukan hukum yang disampaikan sebagai pemegang Lisensi hak merek tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Merek yang menyatakan "Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa". Selanjutnya untuk memperkuat kedudukan pemegang lisensi secara hukum dijelaskan di dalam Pasal 44 Undang-Undang Merek yang berbunyi "Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sarna dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek". Atas dasar itu setiap pemegang hak merek yang sah mempunyai dasar kedudukan hukum sebagai pengguna merek terdaftar beserta dengan hak-hak yang melekat terhadapnya.

Pertanggungjawaban pemerintah dalam proses pendaftaran hak merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik ini, sebenarnya dapat dilihat dari sisi perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui regulasi-regulasi hukum yang dibentuk dan lembaga pendaftaran hak merek yang telah disediakan Pemerintah. Selanjutnya selain daripada itu pertanggungjawaban Pemerintah dapat dilihat dari dua pembahasan pokok, yang pertama dilihat dari sisi pertanggungjawaban pemerintah sebelum dan sesudah terjadinya proses pendaftaran hak merek oleh pemohon, kedua ialah pertanggungjawaban dari sisi melalui Pengadilan Niaga ataupun gugatan ke pengadilan yang menyertakan

pemerintah dalam hal ini Menteri yang pada akhirnya pertanggungjawaban itu juga ada pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik pada awalnya harus memperhatikan prinsip itikad baik itu terpenuhi yaitu oleh pihak Pemeriksa. Selanjutnya pendaftaran dilakukan mulai dari permohonan, pemeriksaan, dan pengumuman, pada akhirnya si pendaftar memenuhi syarat-syarat administratif dan pemeriksaan substansi merek. Kemudian Hak merek yang didaftarkan dicantumkan dalam Daftar Umum Merek serta pemegang hak merek diberikan sertifikat merek sebagai bukti pemegang hak atas merek. Permohonan pendaftaran hak merek tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setelah proses itu semua, pemilik dapat mengalihkan hak merek dan memberikan lisensi kepada pihak lain sesuai Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Merek.

Tanggungjawab Pemerintah dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran merek pada pokoknya dapat dilihat dari Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mengamanahkan Pemerintah dalam hal ini Menteri melalui Dirjen HaKI untuk menilai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon hak merek, hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan substansi merek, jika keseluruhan hal itu dinilai Pemerintah sudah terpenuhi maka merek dapat didaftarkan, jika tidak (termasuk tidak memberlakukan prinsip itikad baik) maka pendaftaran merek ditolak. Selanjutnya tanggungjawab pemerintah setelah merek terdaftar, apabila merek bermasalah dan menyalahi prinsip itikad baik, maka Pemerintah berkewajiban melalui Menteri memprakarsai penghapusan merek yang telah terdaftar sebelumnya itu sesuai Pasal 72. Terakhir pertanggungjawaban pemerintah dapat dimintakan melalui jalur Pengadilan Niaga sesuai Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tanggungjawab Pemerintah disini hanya sampai pada batasan membatalkan sertifikat hak merek yang telah sah didaftarkannya. Sanksi ataupun pertanggungjawaban yang banyak diberikan nantinya adalah kepada pihak pemohon pendaftaran merek yang tidak beritikad baik.

REFERENSI

- Asyhadie, Zaeni. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 94.
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1989. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, Bismar. 2003. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016.
- Saidin, OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cet. ke-9. Jakarta: Rajawali Press.
- Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Sujatmiko, Agung. *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*. dalam JHAPER. Volume 2. Nomor 1. Januari-Juni 2016..
- Sulastri. Satino. Yuliana Yuli W. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*. dalam Jurnal Yuridis. Volume 5. Nomor 1. Juni 2018.
- Tim Lindsey, Eddy Daiman, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, halaman 132.
- TRIPs Agreement* merupakan salah satu dari 15 Persetujuan dari *The Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* bersama *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Wibowo, Ari. 2015. "Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek" . dalam *Jurnal Privat Law*. Volume VII. Juni. 2015.